

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana, dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Dari perencanaan pembangunan ini pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD. Suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yang terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, salah satunya adalah dengan menggunakan metode value for money.

Value For Money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pengukuran tersebut antara lain dapat digunakan sebagai dasar menyusun sistem imbalan atau sebagai dasar penyusunan strategi organisasi atau perusahaan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Dengan kata lain, kinerja institusi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat (Abdulmudy, 2015).

Pengukuran sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan

sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan feedback sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuous improvement). Berdasarkan feedback (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi (Mahsun, 2009:145).

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah *Value For Money*. Menurut Mardiasmo (2009) “*Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.” Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaanya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan karena selama ini sektor publik dinilai sebagai sarang inefisiensi pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kinerja yang mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Dengan dilakukannya maksud dari pengukuran kinerja, maka kita juga bisa memantau

dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya. Selain itu, kita juga bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif.

Laporan yang digunakan untuk pengukuran kinerja adalah Laporan Realisasi Anggaran. Menurut Manurung dan Sihombing (2018) “Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah.” Jika dibandingkan dengan neraca, Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan arus kas.

Sebagai salah satu aparaturnya lembaga di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kupang untuk peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan aparaturnya Pemerintah Kota Kupang, meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kupang, meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah Kota Kupang.

Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *value for money* yang terdiri dari tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini akan meneliti objek penelitian dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2018-2022. Data yang akan

diambil yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) dengan judul Analisis *Value For Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menerapkan konsep *value for money* sebagai alat pengukuran kinerja. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dinyatakan sudah ekonomis, efisien, dan kurang efektif. Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengukur kinerja dengan metode *value for money*. Perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti, peneliti terdahulu melakukan penelitian pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sedangkan penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.

Penelitian yang dilakukan oleh Imanuel. dkk (2021) Judul Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep *Value For Money*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif kuantitatif dalam bentuk studi kasus untuk mengukur kinerja keuangan provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menggunakan rasio ekonomis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah sulawesi utara tahun 2015-2017 sudah ekonomis, karena menghasilkan rasio lebih dari 100%.

Penelitian yang dilakukan Mulyaningtyas (2018) Judul Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto dengan pendekatan *value for money*. 20 Teknik

analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPPKA Kota Mojokerto pada tahun anggaran 2013 masuk kriteria cukup ekonomis, cukup efisiensi, dan sangat efektif. Anggaran 2014 kriteria penilaian kinerja yaitu cukup ekonomis, kurang efisien, dan tidak efektif. Kemudian tahun anggaran 2015, penilaian kinerja keuangannya masuk dalam kriteria cukup ekonomis, kurang efisien, dan sangat efektif.

Yang dilakukan oleh penelitian Hamid, ddk (2019). Judul Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui *Value For Money*, Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen *value for money* yang terdiri dari ekonomis, efisiensi dan efektivitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo.

Kurrohman (2013) melakukan penelitian dengan Judul Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis *Value For Money* di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder dalam bentuk ringkasan realisasi APBD dan ringkasan anggaran APBD kabupaten/kota di provinsi jawa timur dari tahun 2004-2006 dan tahun 2008-2010. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangan setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang**".

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan kinerja program Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas maka persoalan penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan kinerja program Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode kinerja program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

1.4.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan akademik dan praktis yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Manfaat dari segi akademik adalah sebagai pembelajaran atau referensi dan menambah pengetahuan terkait kinerja *Iprogram* pada penelitian penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan dengan menggunakan metode kinerja program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan pemikiran mengenai implementasi kebijakan e-procurement. Serta masukan terhadap pihak organisasi dalam hal menyadari kendala dalam pengimplementasian kebijakan